

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Periode penelitian diambil selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2010-2012 dengan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena besarnya anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal membuat pembangunan terhadap daerah tersebut berkurang. Sehingga semakin sedikit pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana perimbangan memiliki pengaruh dengan arah negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya jika dana perimbangan besar maka kinerja keuangan daerah menurun. hal ini dapat dijelaskan dengan bergantungnya pemerintah daerah pada dana transfer pemerintah pusat, tanpa meningkatkan PAD pada daerahnya. Ini menunjukkan

bahwa pemerintahan tersebut tidak mandiri dalam membangun daerahnya dan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

3. Secara simultan belanja modal, dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 45.2%. sedangkan sisanya sebesar 54.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi dari belanja modal dalam kehidupan yaitu dengan belanja modal maka pemerintah dapat membangun dan menambah aset pada daerahnya. Seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Sehingga struktur belanja modal pun perlu mendapat perhatian khusus, Karena tidak semua belanja modal berefek pada pelayanan publik. Untuk itu, belanja modal perlu lebih rinci untuk menemukan belanja modal yang berefek pada pelayanan publik, misalkan belanja modal infrastruktur. Dengan mengalokasikan belanja modal secara optimal maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Implikasi dari Dana perimbangan dalam kehidupan yaitu dengan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah membantu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. Besarnya dana perimbangan

menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mandiri dalam mengelola keuangannya. Meningkatkan PAD adalah salah satu cara untuk daerah tersebut agar tidak terus menerus bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Semakin kecil dana perimbangannya maka semakin bagus kinerja keuangan daerah pada daerah tersebut.

C. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti berikutnya :
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun pengamatan menjadi 5 tahun atau lebih sehingga hasil yang didapat maksimal.
 - b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan populasi menjadi seluruh Provinsi di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
 - c. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diganti dengan menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio Upaya fiskal, Rasio keserasian, Rasio efisien dan Rasio Efektivitas.
 - d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Lain-lain yang sah.

2. Bagi pemerintahan

Diharapkan pemerintah pusat merealisasikan batas maksimal untuk belanja modal dan batas minimum belanja pegawai sehingga belanja modal dapat direalisasikan dengan baik lagi. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten/kota agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjannya. Sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri lagi dalam membangun daerahnya.